

CATATAN KRITIS FEMINIS MENGUAK DOMINASI KUASA IMF-WORLD BANK DAN FEMINISASI PEMISKINAN PEREMPUAN AKAR RUMPUT



CATATAN KRITIS FEMINIS
MENGUAK DOMINASI KUASA IMF-WORLD BANK
DAN FEMINISASI PEMISKINAN
PEREMPUAN AKAR RUMPUT

Penulis:

Amelia
Armayanti Sanusi
Dina Herdiana
Fina Falahu Sani
Nia Sudin

Kontributor:

Amnesty Amalia Utami

Editor:

Armayanti Sanusi

Layout:

Enday Hidayat

Penanggung Jawab:

Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan

Diterbitkan oleh:

Solidaritas Perempuan
Jl. Jatisari No. 12A, RT.2/RW.7, Jati Padang,
Telp: (021) 22788677
E-mail: soliper@centrin.net.id
Website: www.solidaritasperempuan.org

Solidaritas Perempuan 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
Latar Belakang: Mekanisme Pembiayaan IMF-World Bank dan Pemiskinan Perempuan Akar Rumput.....	4
Dominasi Ekonomi Global dan Mekanisme Pembiayaan IMF-World Bank	9
Di Balik Utang dan Ketidakadilan Fiskal: Pemiskinan Perempuan Akar Rumput dalam Cengkeraman Kuasa IMF-World Bank	16
Deregulasi UU Cipta Kerja bagi Iklim Investasi dan Dampaknya bagi Perempuan.....	19
Program ILASP (<i>Integrated Land Administration and Spatial Planning</i>) Modernisasi Administrasi Pertanahan dan Ancaman terhadap Kedaulatan Agraria	22
Transformasi Teknologi dan Energi Hijau: Ketimpangan Kuasa dan Ancaman bagi Kedaulatan Perempuan Energi Akar Rumput	27
Ketimpangan Anggaran Publik dan Menguatnya Militerisasi di Sektor Strategis	33
Privatisasi Layanan Publik dan Meningkatnya Kerja Perawatan Perempuan.....	37
Gerakan Feminis Perempuan Akar Rumput Melawan Ketidakadilan Utang	42
SIKAP POLITIK FEMINIS SOLIDARITAS PEREMPUAN	45
DAFTAR PUSTAKA.....	50

KATA PENGANTAR

Salam Solidaritas,

Globalisasi dan sistem ekonomi-politik neoliberal telah memperkuat kuasa modal dalam menentukan arah pembangunan melalui liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Melalui pinjaman, dukungan kebijakan, dan pembiayaan proyek, *International Monetary Fund* (IMF) dan World Bank turut mempengaruhi kebijakan ekonomi negara, termasuk Indonesia. Namun, pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dan investasi masih menyisakan persoalan berupa ketimpangan, beban utang, perampasan ruang hidup, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan gender.

Setiap tahun, Pertemuan Musim Semi (*Spring Meetings*) dan Pertemuan Tahunan (*Annual Meetings*) IMF dan World Bank Group mempertemukan gubernur bank sentral, menteri keuangan dan pembangunan, pimpinan sektor swasta, perwakilan masyarakat sipil, serta akademisi untuk membahas kondisi ekonomi global dan berbagai isu internasional, termasuk prospek pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan pengurangan kemiskinan. Pertemuan ini menjadi forum internasional penting untuk mendiskusikan arah dan kebijakan ekonomi global. Pada tahun 2026, Pertemuan Tahunan IMF–World Bank diselenggarakan secara langsung pada 12–18 Oktober 2026 di Bangkok, Thailand.

Bagi perempuan akar rumput, arah kebijakan ekonomi dan pembiayaan global bukanlah persoalan yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Kebijakan yang mengutamakan investasi dan kepentingan pasar dapat memperburuk ketimpangan penguasaan sumber daya, mendorong perampasan tanah dan ruang hidup, serta memperparah krisis ekologis. Perempuan menghadapi ancaman kehilangan sumber penghidupan, terbatasnya akses terhadap pangan dan air, serta meningkatnya beban kerja perawatan yang tidak dibayar. Ironisnya, perempuan kerap menanggung dampak pembangunan tanpa memperoleh ruang yang setara untuk menentukan keputusan yang memengaruhi kehidupannya.

Catatan Kritis Feminis ini disusun sebagai bentuk intervensi politik Solidaritas Perempuan dalam merespons pertemuan tersebut. Berangkat dari perspektif feminis dan pengalaman advokasi di komunitas Solidaritas Perempuan, catatan ini mengkritisi keterkaitan pembiayaan global, utang, ketimpangan agraria, krisis iklim, dan pemiskinan perempuan. Bagi Solidaritas Perempuan, pembiayaan pembangunan harus mengutamakan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan gender, keadilan agraria dan ekologis, serta kedaulatan perempuan atas tubuh, tanah, sumber daya alam, dan sumber penghidupannya. Kami mendesak negara dan lembaga pembiayaan internasional untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas utang, menghentikan pembiayaan IMF-World Bank atas nama pembangunan yang merampas ruang hidup, memastikan partisipasi bermakna perempuan akar rumput, serta menyediakan pemulihan yang adil bagi komunitas terdampak. Pembiayaan pembangunan juga harus menjamin bahwa sumber daya publik digunakan untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat, bukan justru memperbesar beban utang dan ketergantungan pada kepentingan modal. Perubahan sistem ekonomi global dibutuhkan sekarang untuk menentang ketimpangan, patriarki, dan eksploitasi sumber daya, serta membangun ekonomi yang berpusat pada kehidupan, bukan akumulasi keuntungan.

Jakarta, 16 Oktober 2026

Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan

LATAR BELAKANG: MEKANISME PEMBIAYAAN IMF-WORLD BANK DAN PEMISKINAN PEREMPUAN AKAR RUMPUT

Di balik dinamika ekonomi global, terdapat dua lembaga keuangan internasional yang memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan ekonomi dan pembangunan berbagai negara, yaitu International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group (WBG). Keduanya hadir dengan mandat menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan mendukung pembangunan melalui pinjaman dan berbagai skema pembiayaan. Di tengah narasi pembangunan dan kesejahteraan yang digembor-gemborkannya, mekanisme pembiayaan kedua lembaga ini juga akan ikut campur dalam mengatur arah kebijakan ekonomi negara penerima pinjaman. Persyaratan pinjaman, prioritas pembiayaan, dan dorongan terhadap investasi dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengelola anggaran, menentukan sektor pembangunan, serta menetapkan prioritas ekonomi nasional.

Arah kebijakan kedua lembaga ini dibahas dalam berbagai forum internasional, salah satunya melalui Pertemuan Tahunan (*Annual Meetings*) IMF dan World Bank Group yang diselenggarakan setiap tahun. Pertemuan ini berlangsung selama dua tahun berturut-turut di Washington, D.C., Amerika Serikat, kemudian pada tahun ketiga diselenggarakan di negara anggota lain.¹ Forum ini mempertemukan para menteri keuangan, gubernur bank sentral, pimpinan lembaga internasional, sektor swasta, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas kondisi ekonomi global serta arah kebijakan keuangan dan pembangunan. Pada 2026, *Annual Meetings* akan berlangsung di Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), Bangkok, Thailand pada 12 hingga 18 Oktober mendatang. Berbagai agenda dalam forum akan membahas prospek ekonomi global, stabilitas keuangan,

¹ International Monetary Fund. (2026). *Thailand-2026*. International Monetary Fund.
<https://www.imf.org/en/news/seminars/campaigns/2026/10/thailand-2026>

penciptaan lapangan kerja, investasi, dan pembiayaan pembangunan.² *Annual Meetings* ini menjadi salah satu ruang penting bagi para pengambil kebijakan untuk membahas arah ekonomi global dan menentukan prioritas pembangunan yang akan memengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai negara.



Rangkaian *Annual Meetings* tahun ini mencakup sidang utama tingkat menteri dan gubernur, sidang pleno, pemaparan laporan ekonomi, seminar tematik, konferensi pers, serta forum dialog dengan masyarakat sipil.³ Dimulai pada 12 Oktober, rangkaian agenda membahas arah ekonomi global, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI), kondisi pasar kerja, stabilitas keuangan, hingga pembiayaan pembangunan. Pada 12 Oktober, misalnya, agenda *Small AI, Big Jobs* membahas hubungan perkembangan AI dengan penciptaan lapangan kerja. Lalu, esok harinya pada 13 Oktober, IMF menjadwalkan pemaparan *World Economic Outlook* mengenai prospek ekonomi global dan *Global Financial Stability Report* tentang stabilitas keuangan. Sementara itu, agenda pada 14 Oktober mencakup *Mobilizing Private Capital for Jobs* yang membahas mobilisasi modal swasta untuk penciptaan lapangan kerja, serta pemaparan *Fiscal Monitor* mengenai kebijakan fiskal. Pembahasan mengenai pembangunan berlanjut pada 15 Oktober melalui pertemuan *Development Committee*, lalu

² Ibid.

³ International Monetary Fund. (2026). *Annual meetings 2026: Schedule*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/meetings/2026/annual/schedule?date=2026-10-12>

dilanjutkan dengan sidang pleno *Annual Meetings* pada 16 Oktober dan sidang pleno *International Monetary and Financial Committee* (IMFC) pada 17 Oktober. Rangkaian agenda kemudian ditutup pada 18 Oktober.

Di luar agenda utama tersebut, terdapat *Civil Society Policy Forum* (CSPF) yang berlangsung pada 13 hingga 16 Oktober 2026. Forum ini merupakan ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi dengan perwakilan IMF, World Bank, pemerintah, dan berbagai kelompok lainnya. Tahun ini, terdapat 33 sesi di CSPF yang terdiri atas 22 sesi bersama World Bank dan 11 sesi bersama IMF.⁴ Beberapa tema yang akan dibahas, antara lain tata kelola fiskal, tantangan utang, kebijakan pinjaman IMF, serta berbagai isu pembangunan. Kehadiran forum ini sangat penting karena membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan suara komunitas ke dalam pembahasan kebijakan ekonomi global, terutama terkait arah pembiayaan pembangunan yang selama ini turut membentuk kehidupan masyarakat di berbagai negara. Maka, pembahasan mengenai



⁴ World Bank Group. (2026). *Civil society policy forum: Annual meetings 2026*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/events/2026/10/13/civil-society-policy-forum-annual-meetings-2026>

pembiayaan dan pembangunan tidak berhenti pada target ekonomi dan besaran investasi, tetapi turut memberi tempat bagi kepentingan masyarakat yang hidupnya terikat erat pada arah kebijakan tersebut.

Pada saat yang sama, organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara juga menyiapkan rangkaian konsolidasi dan aksi bersama di Bangkok melalui *International People's Assembly* dan *Global Day of Action*. Mengusung seruan “*This World is Ours! Resist, Reclaim, Rise Up for System Change*” (Dunia Ini Milik Kita! Lawan, Rebut Kembali, Bangkit untuk Perubahan Sistem!), OMS bersama-sama mengangkat berbagai tuntutan terkait utang dan penghematan anggaran, keadilan fiskal, krisis iklim, transisi energi, ekstraktivisme, privatisasi layanan publik, ketimpangan, serta keadilan gender. Isu-isu tersebut menjadi bagian dari perlawanan masyarakat sipil terhadap sistem ekonomi neoliberal yang mengutamakan kepentingan pasar dan korporasi dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan pembangunan, yang mana sering kali mengorbankan kepentingan masyarakat di tapak.

Di balik agenda pembangunan dan pembiayaan yang dibahas dalam *Annual Meetings*, terdapat mekanisme ekonomi global yang turut memengaruhi arah kebijakan negara, termasuk Indonesia. Melalui pinjaman dan pembiayaan proyek, IMF dan World Bank memiliki peran dalam berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan. Arah pembiayaan dan pembangunan tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama ketika pelaksanaan proyek-proyek tersebut menyentuh tanah, sumber daya alam, lingkungan, dan ruang hidup komunitas. Bagi perempuan, hal tersebut turut berkaitan dengan keberlangsungan sumber penghidupan, akses terhadap pangan dan air, serta pekerjaan perawatan yang selama ini banyak mereka tanggung. Akibatnya, perempuan harus menanggung dampak pembangunan yang tidak mereka tentukan, sementara suara mereka justru luput dari pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, Solidaritas Perempuan menyusun catatan kritis bertajuk “Mekanisme Pembiayaan IMF dan World Bank dan Pemiskinan Perempuan Akar Rumput” untuk membongkar bagaimana arah kebijakan dan program yang didukung kedua lembaga tersebut berkontribusi terhadap perampasan ruang hidup sehingga menyebabkan pemiskinan terhadap perempuan. Melalui skema pinjaman, dukungan kebijakan, dan pendanaan proyek di sektor agraria dan energi terbarukan, catatan ini mengkritisi bagaimana keterlibatan IMF dan Bank Dunia dalam agenda pembangunan di Indonesia berdampak pada kehidupan perempuan akar rumput. Berangkat dari pengalaman advokasi Solidaritas Perempuan di 12 komunitas, catatan ini mengkritisi arah pembangunan yang mengancam ruang hidup dan sumber penghidupan perempuan, serta menegaskan sikap politik feminis terhadap mekanisme kedua lembaga yang menempatkan kepentingan investasi di atas hak dan keberlangsungan hidup perempuan.

DOMINASI EKONOMI GLOBAL DAN MEKANISME PEMBIAYAAN IMF-WORLD BANK



Dominasi IMF dan World Bank (Bank Dunia) dalam kebijakan ekonomi global tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonialisme dan ketimpangan kekuasaan antara negara-negara Utara dan Selatan. Setelah Perang Dunia II, tatanan ekonomi internasional dibangun melalui Konferensi Bretton Woods pada 1944 di New Hampshire, Amerika Serikat yang melahirkan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia). IMF dan World Bank ini dibentuk sebagai dua pilar utama tatanan ekonomi internasional pasca perang dengan tujuan menjaga stabilitas moneter global, memperluas perdagangan internasional, dan mendukung rekonstruksi setelah Perang Dunia II.⁵ Hingga kini, kedua lembaga ini menempati posisi penting dalam mengatur arah ekonomi global. Meskipun terlihat sama, peran kedua lembaga tersebut berbeda di mana IMF berfokus pada stabilitas moneter dan keuangan,

⁵ Bretton Woods Project. (2026). *The Bretton Woods twins: How do the World Bank and IMF work together?*. Bretton Woods Project. <https://www.brettonwoodsproject.org/2026/07/the-bretton-woods-twins-how-do-the-world-bank-and-imf-work-together/>

sementara Bank Dunia berfokus pada pembangunan dan pengurangan kemiskinan.

Namun, sejak awal, kekuasaan di dalam kedua lembaga ini tidak terbagi secara setara. Hak suara sangat dipengaruhi oleh besarnya kontribusi keuangan negara anggota sehingga negara-negara kaya memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan, sementara banyak negara berkembang yang menanggung dampak keputusan tersebut memiliki ruang yang jauh lebih terbatas untuk menentukan arah kebijakan global. Segelintir kecil negara kaya termasuk Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman dan Jepang mendominasi pengambilan keputusan dan, dalam kasus IMF, masing-masing negara terkaya masing-masing memiliki direktur sementara hanya dua direktur yang mewakili seluruh sub-Sahara Afrika.⁶ Negara-negara Utara masih menguasai bagian yang sangat tidak proporsional dari hak suara di Bank Dunia dan IMF dengan hak suara dibagi menurut negara mana yang menyumbang paling finansial. Sementara negara-negara Selatan, yang memiliki sekitar 85 persen populasi dunia, memiliki kurang dari 50 persen suara.⁷ Dengan kata lain, bahkan jika sebagian besar dunia memilih untuk mengubah kebijakan Bank Dunia dan IMF, mereka tidak akan mampu melakukannya.

International Monetary Fund (Dana Moneter Internasional/IMF) adalah lembaga pemberi utang yang memberikan utang kepada negara-negara ketika mereka memiliki banyak utang dan tidak memiliki pilihan lain. Sebagai imbalan atas utang tersebut, pemerintah penerima harus menyetujui ketentuan yang seharusnya dirancang untuk meningkatkan kinerja ekonomi mereka. Ketentuan ini dikenal dengan nama Program Penyesuaian Struktural (*Structural Adjustment Programs/SAPs*) yang merupakan paket kebijakan ekonomi sebagai syarat dari IMF dan World Bank kepada negara-negara berkembang untuk memperoleh bantuan keuangan atau pinjaman dengan

⁶ Kurniawaty, A., Aziziah, S. P. N. (2023). *Gerakan Feminis dan Perjuangan Keadilan Ekonomi: Catatan Kritis Solidaritas Perempuan atas Sistem Ekonomi Politik Global*. Solidaritas Perempuan.

⁷ *ibid*.

tingkat bunga yang lebih rendah.⁸ Persyaratan ini mencakup banyak prinsip utama neoliberalisme, seperti privatisasi layanan publik, pemotongan alokasi anggaran untuk sektor publik, menurunkan standar upah, mengurangi jaring pengaman sosial dan pembatasan hak-hak buruh.⁹ Semua ini berdampak merugikan khususnya bagi perempuan. Akibatnya, ruang pemerintah untuk menentukan kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakatnya menyempit, sementara kepentingan investor dan pasar memperoleh tempat yang semakin besar dalam keputusan ekonomi nasional.

Bagi negara-negara Selatan yang memiliki ketergantungan pada pinjaman dan investasi asing, ketimpangan ini menciptakan hubungan yang tidak seimbang. Negara-negara tersebut membutuhkan sumber pendanaan untuk menjaga perekonomian dan membiayai pembangunan, tetapi akses terhadap pendanaan sering disertai tuntutan perubahan kebijakan. Ketika prioritas pemerintah diarahkan pada utang dan pasar, maka anggaran negara, layanan dan perlindungan sosial, serta hak-hak pekerja akan ditempatkan di bawah kepentingan stabilitas fiskal dan investasi. Pada saat yang sama, suara masyarakat yang paling terdampak sering kali tidak memperoleh pengaruh yang sebanding dalam pengambilan keputusan. Perempuan menghadapi dampak yang lebih berat ketika pengurangan layanan sosial dengan memindahkan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan dari negara kepada rumah tangga dengan beban kerja perawatan yang banyak ditanggung perempuan tanpa upah (*unpaid carework*).

Di Indonesia sendiri, hubungan dengan IMF terjadi ketika krisis keuangan Asia melanda pada 1997. Krisis ini bermula dari tekanan terhadap nilai tukar dan sistem keuangan di sejumlah negara Asia, lalu menyebar melalui arus modal dan kerentanan perusahaan yang memiliki utang dalam valuta asing. Di Indonesia, pelemahan rupiah membuat beban utang perusahaan

⁸ United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. (n.d.). *Structural adjustment programmes*. <https://archive.unescwa.org/structural-adjustment-programmes>

⁹ Kurniawaty, A., Aziziah, S. P. N. (2023). *Gerakan Feminis dan Perjuangan Keadilan Ekonomi: Catatan Kritis Solidaritas Perempuan atas Sistem Ekonomi Politik Global*. Solidaritas Perempuan.

melonjak, sementara banyak perusahaan dan bank kesulitan memenuhi kewajibannya. Krisis keuangan kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi dan terguncangnya stabilitas politik pemerintahan Soeharto. Maka, pada Oktober 1997, pemerintah Indonesia meminta bantuan IMF untuk menghadapi krisis dan memulihkan kepercayaan pasar. Namun, bantuan tersebut tentu tidak diberikan secara gratis. Ia harus dibayar dengan kesepakatan kebijakan yang mendorong perubahan besar dalam pengelolaan ekonomi nasional.

SAPs diterapkan di Indonesia sebagai syarat penerimaan utang dari IMF yang dimaksudkan oleh pemerintah untuk membantu negara mengatasi krisis ekonomi. Program ini menghendaki Indonesia untuk memperbaiki struktur ekonominya dengan fokus pada privatisasi, deregulasi, dan pengurangan pengeluaran publik. Pelaksanaan SAPs di Indonesia berjalan dengan memperluas pasar, liberalisasi perdagangan, dan pengurangan intervensi pemerintah dalam ekonomi.¹⁰ Beberapa tindakan spesifik antara lain adalah:

1. Privatisasi perusahaan milik negara dan memperkenalkan investasi asing.
2. Pengurangan pengeluaran pemerintah yang menyasar penurunan anggaran kesehatan atau pendidikan dasar.
3. Pengurangan subsidi dan menaikkan harga bahan bakar.

Kesepakatan dengan IMF tersebut menempatkan Indonesia dalam posisi tawar yang semakin lemah. Pada Januari 1998, Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan baru dengan IMF yang memperluas agenda reformasi struktural.¹¹ Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah menyatakan komitmen untuk menaikkan harga energi secara bertahap demi mengurangi subsidi, membuka lebih banyak sektor bagi investasi swasta, dan mempercepat reformasi struktural.¹² Artinya, bantuan untuk mengatasi krisis

¹⁰ *ibid.*

¹¹ International Monetary Fund. (1998). *Indonesia—Memorandum of economic and financial policies*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/external/np/loi/011598.htm>

¹² International Monetary Fund. (1998). *Indonesia--Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/external/np/loi/041098.htm>

berjalan beriringan dengan perubahan arah kebijakan ekonomi Indonesia sesuai agenda yang disyaratkan dalam program IMF. Pengurangan subsidi dan kenaikan harga kebutuhan pokok menambah tekanan terhadap rumah tangga yang daya belinya sudah merosot akibat krisis. Sementara itu, pengurangan belanja dan restrukturisasi ekonomi berlangsung ketika masyarakat justru membutuhkan perlindungan lebih besar. Kebijakan penyesuaian ekonomi tersebut menekan pendapatan dan meningkatkan biaya hidup. Bagi perempuan, tekanan ini berarti semakin beratnya tanggung jawab untuk membuat dapurinya tetap ngebul.

Selain memberikan pinjaman dan mengubah arah politik ekonomi Indonesia, IMF juga mengawasi penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah harus memenuhi target fiskal dan menyampaikan laporan berkala mengenai pendapatan, belanja negara, serta pelaksanaan kebijakan ekonomi kepada IMF. Bukan hanya itu, IMF juga melakukan pemantauan dan evaluasi terkait perkembangan anggaran dan pemenuhan komitmen program. Situasi ini membuat ruang gerak pemerintah dalam menentukan prioritas anggaran semakin terikat pada target dan persyaratan program IMF. Keputusan anggaran tidak lagi sepenuhnya leluasa ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Di sinilah ketimpangan kuasa itu terasa, ketika lembaga keuangan internasional memiliki pengaruh besar terhadap pilihan ekonomi Indonesia, sementara masyarakat yang menanggung konsekuensi kebijakan tersebut tidak memiliki kuasa yang setara untuk menentukan arah anggaran negara.

Selain IMF, World Bank (Bank Dunia) turut terlibat dalam agenda reformasi ekonomi Indonesia, terutama melalui dukungan terhadap restrukturisasi sektor keuangan dan badan usaha negara. World Bank Group (Grup Bank Dunia) terdiri dari lima organisasi internasional yang meminjamkan uang dan memberikan hibah kepada negara berkembang untuk proyek pembangunan tertentu. Grup ini menyatakan dua tujuan pembentukannya, antara lain untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim dan mempromosikan

kemakmuran bersama.¹³ Namun, pada faktanya justru memperburuk. Alih-alih memperbaiki, justru semakin memperdalam kemiskinan dan ketimpangan.

Meskipun Bank Dunia tidak punya peran formal dalam ekonomi makro seperti IMF, ia mempengaruhi tingkat pengambilan keputusan ekonomi terkait dengan iklim investasi negara berkembang. Salah satu cara utama yang menjadi andalannya adalah *Doing Business Report* (DBR) yang mengurutkan negara berdasarkan peringkat seberapa menguntungkan lingkungan bisnisnya. Laporan ini membuat pemerintah suatu negara sangat berfokus pada menciptakan lingkungan bisnis yang menguntungkan, misalnya bagaimana deregulasi tenaga kerja sehingga laporan ini terus memberikan peringkat positif bagi negara-negara yang memprioritaskan deregulasi atau pemotongan/insentif pajak bagi korporasi, dan pada akhirnya merugikan perempuan..¹⁴

Doing Business Report Bank Dunia memberikan peringkat Indonesia pada tahun 2020 sebagai urutan ke-73 dari 190 negara dalam hal kemudahan berbisnis.¹⁵ Indonesia dianggap memiliki lingkungan bisnis yang rumit dan kurang ramah bagi pengusaha. Meskipun pada September 2020, Bank Dunia menghentikan *Doing Business Report* karena adanya temuan audit internal atas manipulasi data yang dilakukan Indonesia dan beberapa negara lainnya.¹⁶ Namun demikian, pemerintah Indonesia tetap mengeluarkan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja yang berfokus pada deregulasi dan memangkas birokrasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memudahkan investasi asing di Indonesia. *Omnibus Law* ini merupakan regulasi yang tidak memperhitungkan hak buruh, hak asasi manusia dan lingkungan, serta terlebih hak perempuan.

¹³ Kurniawaty, A., Aziziah, S. P. N. (2023). *Gerakan Feminis dan Perjuangan Keadilan Ekonomi: Catatan Kritis Solidaritas Perempuan atas Sistem Ekonomi Politik Global*. Solidaritas Perempuan.

¹⁴ *ibid*.

¹⁵ World Bank. (2020). *Doing business 2020: Indonesia*. World Bank.

<https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf>

¹⁶ Jakarta Globe. (2020). *Indonesia Resigns From World Bank's Doing Business Report Amid Manipulation Probe*. Jakarta Globe. <https://jakartaglobe.id/business/indonesia-resigns-from-world-banks-doing-business-report-amidmanipulation-probe>

Keterlibatan Bank Dunia dalam pembangunan Indonesia juga terlihat pada masa krisis 1997–1998. Program-program berjalan beriringan dengan IMF melalui SAPs. Berbeda dari IMF yang memiliki peran utama dalam stabilitas moneter dan dukungan neraca pembayaran, Bank Dunia berperan untuk memengaruhi arah kebijakan ekonomi melalui pembiayaan pembangunan, bantuan teknis, dan rekomendasi kebijakan. Pada Juli 1998, Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar US\$1 miliar melalui *Policy Reform Support Loan* (PRSL) atau Pinjaman Dukungan Reformasi Kebijakan untuk mendukung reformasi kebijakan pemerintah Indonesia di tengah krisis ekonomi. Pinjaman ini berkaitan dengan agenda reformasi sektor keuangan, restrukturisasi korporasi, dan perubahan tata kelola ekonomi. Bank Dunia juga terlibat dalam peninjauan belanja publik, penyusunan kerangka privatisasi, serta reformasi sektor perbankan dan badan usaha milik negara. Bahkan, kantor Bank Dunia di Jakarta turut terlibat dalam merancang persyaratan reformasi struktural yang dimasukkan ke dalam program IMF pada Januari 1998 yang dikenal sebagai *Letter of Intent* (LoI) yang ditandatangani oleh Soeharto. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa pengaruh Bank Dunia tidak terbatas pada pendanaan proyek pembangunan, tetapi turut membentuk kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah Indonesia.

Mekanisme pembiayaan IMF dan Bank Dunia bekerja melalui jalur yang berbeda. IMF umumnya memberikan pinjaman kepada negara yang menghadapi masalah neraca pembayaran dengan persyaratan kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan stabilitas ekonomi dan keuangan. Sementara itu, Bank Dunia memberikan pinjaman, hibah, bantuan teknis, dan dukungan bagi program atau proyek pembangunan jangka panjang. Pengaruhnya dapat masuk melalui pembiayaan proyek tertentu, rekomendasi kebijakan, serta dukungan terhadap reformasi di sektor-sektor yang dianggap penting bagi pembangunan dan iklim investasi. Meskipun berbeda mandat, keduanya sama-sama memiliki kapasitas untuk memengaruhi arah kebijakan ekonomi negara. Di Indonesia, pengaruh tersebut dapat terlihat pada sektor agraria dan

sektor energi terbarukan. Di sektor-sektor inilah arah pembiayaan global yang kemudian memberikan dampak langsung terhadap tanah, sumber daya alam, dan ruang hidup masyarakat, termasuk perempuan akar rumput.

DI BALIK UTANG DAN KETIDAKADILAN FISKAL: PEMISKINAN PEREMPUAN AKAR RUMPUT DALAM CENGKERAMAN KUASA IMF-WORLD BANK



Keterbatasan ruang fiskal Indonesia perlu dibaca dalam keterkaitan antara beban utang, pengaruh lembaga keuangan internasional, kebijakan penerimaan negara, dan prioritas belanja pembangunan. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, rasio utang pemerintah pada 2025 berada di sekitar 40,54% terhadap PDB, sementara anggaran pembayaran bunga utang mencapai 552,9 triliun rupiah. Besarnya kewajiban bunga ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban finansial, padahal sumber daya yang sama dibutuhkan untuk membiayai layanan dan perlindungan sosial beserta pemenuhan hak rakyat.

Dalam konteks pembiayaan eksternal, International Debt Report 2025 Bank Dunia mencatat bahwa pada 2024 total utang luar negeri Indonesia mencapai USD 421,06 miliar. Dari jumlah tersebut, utang jangka panjang pemerintah dan utang yang dijamin pemerintah mencapai USD 245,50 miliar, termasuk USD 39,44 miliar dari kreditor multilateral. Utang kepada Bank Dunia

tercatat sebesar USD 21,57 miliar, sedangkan sisanya berasal dari lembaga multilateral lain, termasuk Asian Development Bank (ADB). Data ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan Indonesia terhubung dengan jaringan lembaga keuangan internasional yang lebih luas, bukan hanya IMF dan Bank Dunia. Namun, saldo utang hanya menggambarkan posisi kewajiban pada periode tertentu, bukan keseluruhan dampak historis utang terhadap kebijakan ekonomi, prioritas pembangunan, pembayaran pokok dan bunga, serta konsekuensi sosial dan ekologis proyek yang dibiayai.

Kondisi krisis ekonomi 1997–1998 memperlihatkan bagaimana krisis utang, kerentanan sektor keuangan, jatuhnya nilai tukar, dan kebijakan penyesuaian ekonomi dapat membatasi ruang pengambilan keputusan nasional. Dalam *Letter of Intent* 31 Oktober 1997, pemerintah Indonesia mengajukan pinjaman melalui fasilitas siaga IMF sebesar SDR 7,3 miliar disertai kerangka kebijakan yang mencakup penyesuaian fiskal, restrukturisasi sektor keuangan, dan reformasi struktural. Dokumen tersebut juga mencatat utang luar negeri Indonesia pada akhir Juni 1997 mencapai USD 140 miliar atau sekitar 60% PDB, termasuk USD 33 miliar utang jangka pendek. Pada 1998, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sekitar 13%. IMF kemudian memperkirakan kontraksi ekonomi akan melampaui 10% serta mencatat tekanan anggaran akibat depresiasi rupiah, subsidi, pembayaran utang, dan kebutuhan memperkuat jaring pengaman sosial.

Dalam kurun waktu 1970 hingga 2003, Indonesia memperoleh pinjaman sebesar USD 139 miliar, tetapi telah mengembalikan dana sebesar USD 164 miliar. Kendati pembayaran tersebut telah dilakukan, jumlah utang luar negeri Indonesia tetap bertambah. Sepanjang periode itu, total pembayaran kembali tercatat mencapai 46 kali lipat dari nilai pinjaman awal. Sejak 1985, jumlah pembayaran utang setiap tahunnya juga selalu melampaui nilai pinjaman baru. Pada 2024, utang luar negeri Indonesia kepada Grup Bank Dunia mencakup USD 21,4 miliar kepada IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), yang dikenal luas sebagai Bank Dunia, serta

USD 185 juta kepada IDA (International Development Association), salah satu anggota Grup Bank Dunia. Jumlah utang Indonesia kepada Bank Dunia diperkirakan meningkat menjadi USD 22,2 miliar pada 2026.¹⁷

Dampak krisis dan mekanisme utang harus ditelusuri secara historis dengan mempertimbangkan berbagai faktor struktural. Warisan tersebut relevan untuk membaca arah kebijakan fiskal Indonesia saat ini. Dalam laporan konsultasi ekonomi Indonesia pada 2026, IMF menyoroti rasio penerimaan pajak yang masih sekitar 10% PDB dan mendorong peningkatan penerimaan negara. Sementara itu, pemerintah menetapkan target penerimaan perpajakan sebesar 2.692 triliun rupiah dalam RAPBN 2026 dengan target rasio perpajakan 10,47% PDB. Peningkatan penerimaan perlu disertai reformasi perpajakan progresif, penutupan celah penghindaran pajak, evaluasi insentif yang tidak efektif, serta kontribusi yang lebih adil dari korporasi besar dan kelompok berpenghasilan tinggi. Tanpa hal tersebut, beban pembiayaan pembangunan berisiko semakin dialihkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk perempuan akar rumput.

Ketidakadilan prioritas fiskal juga perlu dikaji dalam pembiayaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 mengatur mekanisme pembiayaan pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi, dengan pembiayaan maksimal 3 miliar rupiah per unit, tingkat bunga, margin, atau bagi hasil 6% per tahun, serta jangka waktu 72 bulan. Pembayaran kewajiban pembiayaan dapat menggunakan DAU/DBH atau Dana Desa. Persoalannya bukan pada koperasi atau penguatan ekonomi desa itu sendiri, melainkan pada desain pembiayaan dan pembagian risikonya. Ketergantungan pembayaran pada transfer ke daerah atau Dana Desa akan mengurangi kapasitas desa membiayai layanan dan perlindungan sosial, usaha

¹⁷ Official Aksi for Justice. (2026). *The World Bank's Crimes Against the Indonesian People*. Instagram. https://www.instagram.com/p/DebMvghD5J1/?img_index=1&xtok=MTR4YmQxcGh1djBqbQ%3D%3D

perempuan, serta inisiatif ekonomi solidaritas berbasis komunitas. Kelayakan usaha, kepemilikan aset, risiko gagal bayar, pengawasan, serta partisipasi bermakna perempuan dalam menentukan prioritas ekonomi desa harus menjadi bagian dari penilaian.

DEREGULASI UU CIPTA KERJA BAGI IKLIM INVESTASI DAN DAMPAKNYA BAGI PEREMPUAN

Berdasarkan *Executive Summary* laporan 2024 *Investment Climate Statements*, Indonesia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, UU Cipta Kerja diposisikan pemerintah Indonesia sebagai reformasi untuk meningkatkan daya saing melalui penurunan pajak korporasi, fleksibilitas ketenagakerjaan, dan penyederhanaan regulasi. Laporan tersebut juga mencatat bahwa serikat buruh menilai perubahan kebijakan ketenagakerjaan telah melemahkan hak-hak pekerja, sementara investor masih menghadapi ketidakpastian regulasi dan persoalan birokrasi.¹⁸ World Bank juga secara terbuka menyebut UU Cipta Kerja sebagai reformasi besar untuk meningkatkan daya saing Indonesia, mengurangi hambatan investasi, menarik investor, dan menciptakan lapangan kerja.

Bank Dunia menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam pelaksanaan reformasi tersebut melalui *World Bank Statement on Omnibus Law - Job Creation*¹⁹. Selain itu Dalam konsultasi Pasal IV dengan Indonesia, IMF menyebut legislasi Cipta Kerja sebagai bagian dari reformasi struktural dan mendorong implementasi berkelanjutan, pengurangan pembatasan pasar tenaga kerja, perbaikan iklim investasi, serta penyederhanaan regulasi usaha. Hal itu diperkuat melalui Dokumen pembiayaan kebijakan pembangunan World Bank menjelaskan bahwa

¹⁸ U.S. Department of State. (2024). *2024 investment climate statements: Indonesia*. U.S. Department of State. <https://2021-2025.state.gov/reports/2024-investment-climate-statements/indonesia/>

¹⁹ World Bank. (2020). *World Bank statement on omnibus law – job creation*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/statement/2020/10/16/world-bank-statement-on-omnibus-law-job-creation>

reformasi melalui UU Cipta Kerja ditujukan untuk memperbaiki iklim investasi dan menghapus sejumlah pembatasan usaha.²⁰

UU Cipta Kerja memiliki keterhubungan kuat antara kebijakan ekonomi nasional dan agenda reformasi struktural yang didukung IMF–World Bank, terutama dalam mendorong liberalisasi investasi, fleksibilitas pasar tenaga kerja, penyederhanaan regulasi, dan mobilisasi modal swasta. World Bank secara terbuka mendukung UU Cipta Kerja sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi hambatan investasi, sementara IMF mendorong reformasi pasar tenaga kerja dan perbaikan iklim investasi di Indonesia. Dukungan World Bank terhadap reformasi investasi dan perdagangan juga tercermin dalam pembiayaan kebijakan pembangunan.²¹



Bagi Solidaritas Perempuan utang luar negeri tidak dapat dipisahkan dari agenda deregulasi ketika pembiayaan dan rekomendasi kebijakan lembaga keuangan internasional, termasuk IMF–World Bank, mendorong

²⁰ *ibid.*

²¹ International Monetary Fund. (2023). *IMF executive board concludes 2023 Article IV consultation with Indonesia*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/news/articles/2023/06/22/pr23229-indonesia-imf-executive-board-concludes-2023-article-iv-consultation-with-indonesia>

reformasi struktural.UU Cipta Kerja mencerminkan agenda reformasi struktural yang didukung IMF–World Bank, terutama liberalisasi investasi, fleksibilitas pasar tenaga kerja, dan penyederhanaan regulasi. Orientasi ini telah terbukti memperkuat penguasaan sumber daya oleh kepentingan investasi dengan mengorbankan perlindungan hak pekerja, keadilan agraria, dan keberlanjutan lingkungan dan pelanggaran hak konstitusional perempuan akar rumput.²² Bagi perempuan akar rumput, dampaknya terlihat pada terbatasnya partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan, kehilangan tanah dan sumber penghidupan, serta meningkatnya beban kerja perawatan tidak berbayar. Hambatan mengakses informasi, pembuktian kerusakan lingkungan, dan pemulihan hak juga memperdalam ketimpangan dan feminisasi pemiskinan.²³

²² Saputra, E. Y. (2026). *Kerugian Konstitusional Perempuan Akibat PSN, Seperti Apa?*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/solidaritas-perempuan-undang-undang-cipta-kerja-2281862>

²³ Santoso, B., Irianto, D. H. (2026). UU Cipta Kerja Diuji di MK, Komnas Perempuan Minta Hakim Gunakan Analisis Hukum Feminis. Suara.com. <https://amp.suara.com/news/2026/10/12/133240/uu-cipta-kerja-diuji-di-mk-komnas-perempuan-minta-hakim-gunakan-analisis-hukum-feminis>

PROGRAM ILASP (INTEGRATED LAND ADMINISTRATION AND SPATIAL PLANNING) MODERNISASI ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN ANCAMAN TERHADAP KEDAULATAN AGRARIA

Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) atau Program Integrasi Administrasi Pertanahan dan Tata Ruang merupakan program yang didukung pembiayaan World Bank dan disetujui pada 30 September 2024 dengan nilai US\$653 juta melalui skema pinjaman *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD). Program ini dirancang untuk memperkuat pendaftaran dan administrasi pertanahan, mengintegrasikan data pertanahan dan informasi geospasial, memperbaiki perencanaan tata ruang berbasis iklim, serta mendukung pengelolaan lahan dan peningkatan kepastian hukum atas tanah. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah Indonesia, antara lain melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri, dalam periode 2025–2030.²⁴

Dana ini digunakan untuk mendanai proyek tersebut selama 5 tahun (periode 2025–2030). Selain itu, ini merupakan dana utang karena menggunakan skema pinjaman International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).²⁵ Pinjaman ILASP menjadi bagian dari kewajiban fiskal negara yang pembayarannya harus dipenuhi melalui anggaran sesuai perjanjian. Kritiknya adalah ketika negara menggunakan utang, ia akan ditanggung oleh rakyat Indonesia untuk membiayai reformasi pertanahan. Apakah program ini sudah menjamin mengentaskan ketimpangan penguasaan tanah dan penyelesaian konflik agraria? Sudah lebih satu dekade program ini

²⁴ World Bank Group. (n.d.). *Ambisi Iklim Indonesia Mendapatkan Dorongan Melalui Reformasi Administrasi Pertanahan dan Perencanaan Tata Ruang yang Didukung oleh Bank Dunia*. World Bank. <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2024/09/30/indonesia-s-climate-ambitions-gain-boost-through-world-bank-supported-land-administration-and-spatial-planning-reform>

²⁵ IBRD merupakan skema secara khusus dirancang untuk memberikan pinjaman, jaminan kredit, serta bantuan teknis kepada pemerintah negara-negara berkembang dengan pendapatan menengah (*middle-income countries*) serta negara miskin yang dinilai layak kredit (*creditworthy*).

berjalan, fakta di lapangan menunjukkan penguasaan dan ketimpangan kepemilikan lahan tidak benar-benar terselesaikan, bahkan konflik agraria terus meningkat. Data BPS 2023, melalui data Sensus Pertanian, menunjukkan jumlah rumah tangga petani gurem²⁶ tercatat sebanyak 16,89 juta rumah tangga atau mencapai 17,25 juta petani, yakni sekitar 60,84% hingga 62,05% dari total petani pengguna lahan di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi pertanahan saja tidak cukup untuk menjawab persoalan ketimpangan agraria.

Kritik utamanya adalah bahwa modernisasi administrasi pertanahan yang dibiayai melalui utang tidak otomatis menghasilkan keadilan agraria. Tanpa redistribusi tanah, penyelesaian konflik, pengakuan hak kolektif, dan perlindungan hak perempuan, ILASP berisiko memperkuat kapasitas negara dalam mengatur tanah tanpa mengoreksi ketimpangan penguasaan yang menjadi akar persoalan agraria Indonesia. Bahkan, apabila integrasi data dan tata ruang lebih diarahkan untuk mempermudah investasi daripada melindungi ruang hidup masyarakat, modernisasi tersebut berpotensi memperbesar ketimpangan dan konflik agraria. Data 16,89 juta rumah tangga petani gurem menunjukkan besarnya persoalan keterbatasan penguasaan lahan di sektor pertanian. Ketimpangan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendaftaran tanah dan integrasi data karena akar persoalannya juga mencakup konsentrasi penguasaan tanah, tumpang tindih perizinan, ekspansi perkebunan dan industri ekstraktif, proyek strategis nasional, serta pengabaian hak masyarakat.

²⁶ Petani dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektare



Bagi Solidaritas Perempuan, reforma agraria bukan sekadar penataan administratif, melainkan upaya mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah dan relasi kuasa yang merugikan rakyat, khususnya perempuan akar rumput. Reforma agraria harus menjamin pengakuan dan perlindungan hak perempuan atas tanah dan sumber-sumber agraria secara substantif, serta menempatkan perempuan sebagai subjek pemegang hak yang memiliki kewenangan untuk mengakses, menguasai, mengelola, menentukan penggunaan, dan menikmati manfaat sumber agraria secara setara. Reforma agraria harus menjamin partisipasi bermakna dan penerapan prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) dalam seluruh proses pengambilan keputusan yang berdampak pada tanah dan wilayah kelola rakyat. Perempuan akar rumput harus memperoleh informasi yang lengkap dan mudah diakses, ruang untuk menyampaikan keberatan dan mempengaruhi keputusan, serta hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan secara bebas tanpa intimidasi maupun paksaan. Mekanisme pengaduan dan pemulihan juga harus tersedia secara aman dan mudah diakses.

Catatan advokasi Solidaritas Perempuan, konflik agraria PTPN VII Cinta Manis di Ogan Ilir, Sumatera Selatan menguasai sekitar 20.089 hektare lahan dan mengkriminalisasi 65 orang. PTPN VII Cinta Manis menguasai lahan masyarakat sejak tahun 1982, sedangkan SK HGU baru diterbitkan pada bulan Agustus tahun 1995, yang berarti selama kurang lebih 13 tahun PTPN VII Cinta Manis beraktivitas secara ilegal. Selain itu, proses pendataan, pengukuran lahan, dan penetapan ganti kerugian kepada masyarakat dilakukan sepihak. Banyak masyarakat mengalami pengurangan luasan tanah secara sepihak, misalnya lahan seluas lima hektar hanya diganti satu hektar, atau diganti tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Adanya ketimpangan penguasaan lahan ini mengakibatkan terjadinya konflik agraria yang juga melibatkan aparat militer. Di tengah konflik agraria yang tak kunjung selesai, aktivitas perkebunan tebu memperparah kerusakan lingkungan di mana setiap musim panen, lahan tebu dibakar secara rutin sekali dalam setahun. Asap yang dihasilkan menyebabkan pencemaran udara yang meluas bahkan hingga ke wilayah Indralaya dan Palembang. Asap tebal tersebut terus bergerak mengikuti arah angin, masuk ke rumah-rumah, sekolah, dan ruang hidup masyarakat. Asap pekat tersebut memicu sesak napas, batuk kronis, dan peningkatan kasus ISPA, yang banyak dialami perempuan dan anak-anak²⁷. Air sumur yang menjadi sumber utama air minum dan memasak ikut tercemar oleh bunga asap sehingga memaksa perempuan membeli air bersih dengan biaya tambahan untuk kebutuhan keluarga.

Di wilayah lain, yakni Takalar, Sulawesi Selatan, konflik agraria antara masyarakat dengan BUMN PTPN 1 Regional 8 yang menguasai sekitar 6.546 hektare lahan. Sama seperti PTPN VII Cinta Manis, penguasaan tanah tersebut juga dilakukan secara ilegal karena masih beraktivitas hingga kini, meskipun Hak Guna Usaha (HGU) telah berakhir sejak 9 Juli 2024. Sementara itu, Badan Bank Tanah di Desa Watutau, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah mengklaim 2.840,68 hektare lahan sebagai Hak Pengelolaan Lahan (HPL), sementara

²⁷ *Ibid.*

sekitar 550 hektare yang masuk klaim tersebut merupakan lahan produktif masyarakat. Lahan yang selama ini dikelola masyarakat sebagai sumber penghidupannya justru kehilangan akses akibat penetapan batas kawasan. Padahal, kebun dan tanah yang dikelola masyarakat menopang pangan, pendapatan, pengetahuan lokal, serta keberlanjutan hidup antargenerasi. Klaim penguasaan tanah itu juga berlangsung tanpa konsultasi bermakna yang melibatkan seluruh unsur masyarakat terdampak, khususnya perempuan. Ketika masyarakat Watutau melawan untuk mempertahankan kebun milik mereka, negara justru membalasnya dengan melakukan kriminalisasi. Solidaritas Perempuan Palu mencatat sepanjang 2025 sedikitnya 15 masyarakat dipanggil polisi dan satu orang ditetapkan sebagai tersangka.

Dengan demikian, pembiayaan Bank Dunia dalam program *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) akan memperparah kondisi ketimpangan kuasa atas akses dan kontrol masyarakat khususnya perempuan terhadap kepemilikan dan pengelolaan sumber agraria, termasuk memperbesar eskalasi konflik masyarakat adat dan kriminalisasi. Sejatinya keberhasilan reforma agraria harus diukur dari kemampuannya menyelesaikan konflik, memulihkan hak rakyat, mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah, menjamin kedaulatan perempuan, dan mewujudkan keadilan gender. Reforma agraria tidak boleh direduksi menjadi pembentukan lembaga dan mekanisme administratif yang justru berpotensi mempertahankan atau memperluas ketimpangan relasi kuasa serta membatasi akses dan kontrol rakyat, khususnya perempuan akar rumput, atas tanah dan sumber-sumber agraria.

TRANSFORMASI TEKNOLOGI DAN ENERGI HIJAU: KETIMPANGAN KUASA DAN ANCAMAN BAGI KEDAULATAN PEREMPUAN ENERGI AKAR RUMPUT



Program kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dan kendaraan listrik (*Electric Vehicle/EV*) adalah program yang masuk dalam kerangka transformasi ekonomi global yang mendorong digitalisasi, industri rendah karbo, dan mobilisasi investasi swasta. Dalam pertemuan IMF-Bank Dunia di Bangkok, agenda AI ini secara eksplisit dibahas melalui program *Small AI, Big Jobs* dari Bank Dunia. Agenda ini membahas bagaimana aplikasi kecerdasan buatan yang praktis, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan lokal dapat dikembangkan dari uji coba menjadi penggunaan yang lebih luas untuk mendukung penciptaan lapangan kerja di negara berkembang²⁸. Selain itu, pemerintah Thailand menerapkan inisiatif *Green Meeting* di mana salah satu langkah konkretnya adalah menyediakan lebih dari 320 kendaraan listrik untuk

²⁸ World Bank. (2026). *Small AI, big jobs*. World Bank. <https://live.worldbank.org/en/event/2026/annual-meetings-small-ai-big-jobs>

transportasi peserta. Pemerintah Thailand memperkirakan penggunaan armada tersebut dapat mengurangi emisi gas rumah kaca lebih dari 95,8 ton CO₂ ekuivalen. Inisiatif lain mencakup sistem pertemuan tanpa kertas, pengelolaan sampah, dan pengurangan plastik sekali pakai²⁹. Agenda digitalisasi, produktivitas, transisi energi, dan mobilisasi investasi saling berkaitan dalam membentuk arah pembangunan negara berkembang. Oleh karena itu, penting untuk melihat bahwa bukan hanya peluang ekonomi yang ditawarkan, melainkan juga konsekuensi kebijakan tersebut terhadap kedaulatan ekonomi, kemampuan negara menyediakan layanan publik, ketenagakerjaan, dan distribusi manfaat pembangunan.

Di Indonesia, pengembangan AI dan kendaraan listrik meningkatkan kebutuhan pusat data, listrik, air, dan mineral, terutama nikel. Ekspansi pertambangan dan industri pengolahan berdampak pada penguasaan tanah, pencemaran, kerusakan ekosistem, kesehatan, dan hilangnya sumber penghidupan. Dampak ini tidak netral gender perempuan adat dan petani berisiko kehilangan tanah serta sumber pangan, identitas dan pengetahuan lokal mereka, sedangkan perempuan nelayan akan kehilangan akses terhadap wilayah tangkap; sementara perempuan miskin, pekerja informal, penyandang disabilitas, dan kelompok yang mengalami diskriminasi berlapis menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses layanan, perlindungan, dan pemulihan. Kelangkaan air dan pangan juga meningkatkan beban kerja perawatan tidak berbayar serta risiko kekerasan dan pemiskinan. Karena itu, pengurangan emisi dan peningkatan produktivitas tidak dapat disebut adil jika bebannya ditanggung perempuan akar rumput.

Dalam konteks agenda dan pembiayaan IMF–World Bank, transformasi digital dan ekonomi hijau perlu dinilai berdasarkan manfaat publik, transparansi, risiko fiskal, serta dampak sosial-ekologisnya. Pembiayaan harus menjamin partisipasi bermakna perempuan dengan

²⁹ The Government Public Relation Department of Thailand. (2026). “*Green Meeting*” initiative at the 2026 IMF-WBG Meetings in Bangkok. The Government Public Relation Department of Thailand. <https://thailand.prd.go.th/en/content/category/detail/id/48/iid/549725>

beragam identitas dan kondisi, melindungi hak serta ruang hidup komunitas, dan tidak mengorbankan anggaran pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta layanan dasar. Transisi yang adil harus mengatasi ketimpangan interseksional, bukan memindahkan beban krisis kepada perempuan yang paling terdampak.

Selain mendorong penggunaan AI dan kendaraan listrik, terdapat suatu program di Indonesia, yakni *Sustainable Least-Cost Electrification-2* (ISLE-2) yang merupakan bagian dari program investasi strategis Bank Dunia. ISLE ini didukung untuk mempercepat implementasi transisi energi di Indonesia. Operasi ISLE-2 terdiri atas (i) komponen *Program for Results* (PforR) yang didanai melalui pinjaman *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) sebesar USD 600 juta serta hibah sebesar USD 3 juta dari *Energy Sector Management Assistance Program* (ESMAP); dan (ii) komponen *Investment Project Financing* (IPF) yang didanai melalui hibah sebesar USD10

juta dari *Green Climate Fund* (GCF). Kedua komponen tersebut secara bersama-sama membentuk Operasi ISLE-2³⁰. Keterlibatan World Bank juga terlihat dalam sektor ketenagalistrikan. Pada 2025, World Bank menyetujui pembiayaan US\$500 juta untuk *Indonesia Electricity Network Transformation* (I-ENET), periode 2025–2032, guna memodernisasi jaringan distribusi listrik di Jawa, Madura, dan Bali. Program ini juga mencakup pembiayaan PLN sebesar \$491 juta dan perkiraan mobilisasi modal swasta \$342 juta.



³⁰ PLN. (n.d.). *Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification-2 (ISLE-2) Project*. PLN.

<https://www.pln.co.id/hubungan-investor-id/lainnya-id/indonesia-sustainable-least-cost-electrification-2-isle-2-project-id>

Menurut Bank Dunia, program ini memiliki empat sasaran utama. Sasaran pertama adalah untuk memperluas akses listrik bagi sekitar 3,5 juta orang. Kedua, mendukung pengembangan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) sebesar 540 MW. Ketiga, menurunkan biaya pembangkit listrik setidaknya 8 persen. Yang keempat adalah mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 10 persen wilayah Kalimantan dan Sumatera.³¹ Angka-angka tersebut merupakan target program, bukan manfaat dari program yang telah terealisasi. Pencapaian target tersebut penting untuk dinilai berdasarkan pelaksanaan program, pengembangan pembangunan infrastruktur serta dampak sosial dan ekologis yang akan muncul di wilayah yang menjadi sasaran dari proyek tersebut, khususnya dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Dari sisi geografis, wilayah sasaran utama ISLE-2 adalah Sumatra dan Kalimantan. Berdasarkan peta provinsi dalam dokumen *Environmental and Social Systems Assessment* (ESSA)³² Bank Dunia, wilayah program mencakup sembilan provinsi di Sumatra dan lima provinsi di Kalimantan. Untuk di wilayah Sumatra ada di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, di wilayah Kalimantan ada di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Wilayah-wilayah ini memiliki karakteristik sosial-ekologis yang beragam, termasuk kawasan pertanian, perkebunan, pertambangan, hutan, wilayah masyarakat adat, dan jaringan ketenagalistrikan yang berbeda-beda.

³¹ World Bank. (2025). *World Bank approves investments to boost Indonesia's economic growth and access to clean energy*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/06/16/world-bank-approves-investments-to-boost-indonesia-s-economic-growth-and-access-to-clean-energy>

³² World Bank. (2024). *Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification-2 (ISLE-2) Program-for-Results (PforR) (P501217): Environmental and Social Systems Assessment (ESSA) report*. World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099070224053020856/pdf/P501217-b0b3bea7-e048-4268-a754-ec763600f728.pdf>

ISLE-2 penting dipahami bukan hanya sekedar proyek pembangunan pembangkit energi terbarukan, namun program ini mencakup pembenahan perencanaan sistem pembangkitan, penguatan kapasitas teknis PLN, dukungan terhadap pengembangan jaringan transmisi serta peningkatan kapasitas pengelolaan aspek lingkungan dan sosial. Dalam program ini penting juga melihat peran GCF sebagai salah satu sumber pendanaan iklim internasional. *Green Climate Fund* (GCF) adalah dana iklim internasional yang dibentuk dalam kerangka Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC)³³. GCF mendukung negara berkembang dalam menjalankan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui berbagai bentuk pendanaan, termasuk hibah dan instrumen pembiayaan lainnya³⁴. Dalam konteks ISLE-2, GCF mendukung komponen *Investment Project Financing* melalui hibah sebesar USD 10 juta yang mencakup perencanaan pembangkitan dan integrasi energi terbarukan, dukungan transaksi, serta kajian lingkungan dan sosial untuk investasi jaringan. Artinya, pelaksanaan ISLE-2 tidak hanya berkaitan dengan pilihan teknologi dan penambahan kapasitas energi, namun ada proses perencanaan, pengambilan keputusan investasi. Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang membayar biaya dampak dari transisi energi³⁵.

Pengalaman advokasi Solidaritas Perempuan dalam melawan proyek transisi energi di komunitas menjadi potret kritis feminis yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah Indonesia. Seperti perlawanan perempuan adat untuk menolak geothermal di Poco Leok.³⁶ Penolakan terhadap perluasan

³³ Green Climate Fund. (n.d.). “*The World’s Climate Fund for Developing Countries*”. Green Climate Fund. <https://www.greenclimate.fund/about>

³⁴ Green Climate Fund. (n.d.). *Mitigation*. Green Climate Fund. <https://www.greenclimate.fund/portfolio/areas-of-work/mitigation>

³⁵ Firmansyah M., Jatmiko, B. P. (2025). *Kebijakan Mitigasi Iklim di Indonesia Dinilai Pinggirkan Peran Perempuan Akar Rumpun*. Kompas. <https://lestari.kompas.com/read/2025/12/30/203841286/kebijakan-mitigasi-iklim-di-indonesia-dinilai-pinggirkan-peran-perempuan>

³⁶ Wurati, E. (2026). *Solidaritas Perempuan Flobamoratas: Gugatan Warga Poco Leok terhadap Bupati Manggarai Ujian Komitmen Perlindungan Negara atas Perempuan Adat*. Flores. <https://flores.co/reportase/mendalam/83681/2026/01/31/solidaritas-perempuan-flobamoratas-gugatan-warga-poco-leok-terhadap-bupati-manggarai-ujian-komitmen-perlindungan-negara-atas-perempuan>

proyek geothermal dilakukan mereka demi menjaga lima unsur falsafah hidup masyarakat adat Poco Leok. Lima unsur yang disebut Lampek Lima itu meliputi, yakni Gendang (rumah adat), Lingko (lahan perkebunan), Natas (halaman atau ruang publik), Wae (mata air), dan Compang (altar sesaji kepada leluhur).³⁷ Selain di Poco Leok, perlawanan perempuan dan masyarakat di Gunung Rajabasa, Lampung Selatan, juga terus berlangsung untuk menolak eksplorasi panas bumi (geothermal). Bagi masyarakat adat Saibatin, Gunung Rajabasa bukan sekadar kawasan alam, melainkan bagian dari falsafah dan simbol adat yang menopang identitas serta keberlangsungan hidup komunitas. Gunung ini juga memiliki makna penting sebagai ruang aman bagi masyarakat di kaki gunung untuk menyelamatkan dan mengevakuasi diri saat terjadi bencana, termasuk letusan Krakatau pada 1983 dan tsunami 2018. Catatan advokasi Solidaritas Perempuan Sebay Lampung menyebutkan bahwa sekitar 80 hektare lahan masyarakat terdampak pembebasan lahan, sementara persoalan sumber air berpotensi memengaruhi kehidupan warga di empat kecamatan dan 39 desa. Tidak hanya di NTT dan Lampung, di Di Sulewana, SP Poso mencatat laporan kerusakan 26 rumah, satu gereja, dan 32 lahan kebun yang dikaitkan masyarakat dengan aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso Energy.³⁸

Perlawanan perempuan Poco Leok, Lampung dan Poso menegaskan bahwa proyek transisi energi tidak boleh mengulang pembangunan ekstraktif patriarki yang mengorbankan kehidupan atas nama energi bersih solusi palsu iklim. Keadilan transisi harus berlandaskan keadilan rekognisi, mengakui dan menghormati relasi kosmologis dan holistik perempuan dengan alam, perlindungan hak masyarakat adat, serta partisipasi bermakna perempuan

[adat#:~:text=Flores.co%20E2%80%93%20Solidaritas%20Perempuan%20Flobamoratas%20%28SPF%29%20yang%20berbasis,komitmen%20negara%20melindungi%20perempuan%20adat%20dan%20ruang%20sipil.](#)

³⁷ Tanjung, E. (2024). Mimpi Buruk Proyek Geothermal: Keteguhan Warga Poco Leok Jaga Tanah dan Adat. Liputan Khas Suara. https://liks.suara.com/read/2024/10/14/113007/mimpi-buruk-proyek-geothermal-keteguhan-warga-poco-leok-jaga-tanah-dan-adat#google_vignette

³⁸ Amelia, Icut, A., Rina, Sani, F. F., Sari, N., Sofitasari., Tatubeket, F., Warlif, Y. (2026). *Nyala Harapan: Menolak Tunduk - 35 Tahun Berjuang Bersama Perempuan Akar Rumput (Catatan Tahunan [CATAHU] Solidaritas Perempuan 2025)*. Andriyeni (Ed.). Jakarta: Solidaritas Perempuan.

dalam pengambilan keputusan. Pemerintah juga harus menghormati hak dan keputusan komunitas serta mendukung inisiatif energi berbasis komunitas yang sesuai dengan kebutuhan, pengetahuan lokal, dan kedaulatan masyarakat. Energi berkeadilan bukan hanya tentang menurunkan emisi, tetapi juga menjaga keberlanjutan kehidupan, memulihkan relasi manusia dengan alam, dan memastikan perempuan akar rumput berdaulat menentukan masa depannya.

KETIMPANGAN ANGGARAN PUBLIK DAN MENGUATNYA MILITERISASI DI SEKTOR STRATEGIS

Militerisasi dan prioritas anggaran dalam konteks Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh peningkatan belanja militer di kawasan Asia dan Pasifik. Dalam konteks Indonesia, persoalan ini perlu dilihat dan dikritisi bukan hanya dari besarnya anggaran pertahanan, tetapi juga dari arah kebijakan pembangunan, perluasan peran institusi militer, serta pilihan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya publik. Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2026, realisasi anggaran fungsi pertahanan meningkat dari sekitar 125,8 triliun pada 2021 menjadi 190,3 triliun pada 2024. Untuk 2025, *outlook* anggaran fungsi pertahanan diperkirakan mencapai 245,2 triliun. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pengadaan, pemeliharaan, dan modernisasi alat utama sistem persenjataan serta sarana dan prasarana pertahanan. Data ini menunjukkan peningkatan alokasi fungsi pertahanan dalam beberapa tahun terakhir.

Pengeluaran militer global pada 2025 mencapai USD 2,887 triliun atau sekitar 2,9 triliun meningkat 2,9% secara riil dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi tingkat tertinggi yang pernah tercatat. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia merupakan tiga negara dengan pengeluaran militer terbesar. Sementara itu, kawasan Asia dan Oseania mencatat peningkatan belanja militer sebesar 8,1%, menjadi USD 681 miliar pada 2025. Tren ini menunjukkan bahwa ketegangan geopolitik dan narasi keamanan nasional terus menjadi

bagian penting dalam kebijakan fiskal negara, dengan konsekuensi terhadap prioritas pendanaan pembangunan dan pemenuhan hak-hak rakyat.³⁹

Pada 2023, biaya ekonomi global akibat kekerasan diperkirakan mencapai USD 19,1 triliun, setara dengan 13,5% PDB global. Sebaliknya, pendanaan untuk pembangunan perdamaian dan pemeliharaan perdamaian masih sangat kecil dibandingkan sumber daya yang dialokasikan untuk militer. Ketimpangan prioritas ini menjadi persoalan mendasar: ketika negara mengerahkan sumber daya yang besar untuk persenjataan dan pertahanan, kebutuhan mendesak masyarakat atas layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, air bersih, ketahanan pangan, dan penanganan krisis iklim tetap membutuhkan pendanaan yang memadai. Analisis lintas negara periode 2000–2013 juga menemukan hubungan pengurangan belanja kesehatan ketika pengeluaran militer meningkat, dengan dampak yang lebih besar di negara berpendapatan rendah. Temuan historis tersebut memperlihatkan risiko *trade-off* fiskal, meskipun besarnya dampak dapat berbeda menurut kebijakan dan kondisi setiap negara. Meningkatnya militerisasi di kawasan Asia dan Pasifik tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan ekonomi global, prioritas anggaran negara, dan model pembangunan yang berorientasi pada investasi serta akumulasi modal.

Perluasan militerisasi di Indonesia perlu dibaca dalam kaitannya dengan peningkatan anggaran pertahanan, perubahan kelembagaan militer, serta arah kebijakan ekonomi dan pembangunan. Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2026, realisasi anggaran fungsi pertahanan meningkat dari Rp125,8 triliun pada 2021 menjadi Rp190,3 triliun pada 2024, sedangkan *outlook* 2025 diperkirakan mencapai Rp245,2 triliun. Dengan demikian, secara nominal terdapat kenaikan sekitar 51,3 persen pada periode 2021–2024.⁴⁰ Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU

³⁹ Liang, X., et al. (2025). *Trends in World Military Expenditure*. Stockholm International Peace Research Institute. <https://www.sipri.org/publications/2026/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2025>

⁴⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Buku II Nota keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/507d21b0-2abe-4d75-86aa-dc3efe505843>

TNI mengubah sejumlah ketentuan mengenai tugas TNI dan penempatan prajurit pada kementerian/lembaga. Perkembangan ini menunjukkan pentingnya menelaah militerisasi bukan hanya dari sisi pengadaan alat utama sistem persenjataan, tetapi juga dari perluasan ruang keterlibatan institusi militer dalam tata kelola negara.

Pada tingkat kebijakan ekonomi, IMF dan World Bank memiliki pengaruh melalui mekanisme yang berbeda. IMF mempengaruhi diskursus dan pilihan kebijakan makro ekonomi melalui konsultasi Pasal IV, rekomendasi fiskal dan moneter, serta dukungan pembiayaan dalam situasi krisis. Dalam konsultasi Indonesia 2024, IMF antara lain menekankan penguatan penerimaan negara, penajaman subsidi energi, perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas belanja kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, Kerangka Kerja Kemitraan Negara World Bank Group untuk 2026–2030 memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, mobilisasi investasi swasta, pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Keterhubungan IMF dan World Bank dengan perluasan peran militer ke ranah sipil di Indonesia perlu ditelaah melalui hubungan antara kebijakan makroekonomi, pembiayaan pembangunan, prioritas fiskal, dan model pembangunan yang dijalankan negara.⁴¹ IMF mempengaruhi arah kebijakan melalui pengawasan ekonomi, rekomendasi kebijakan fiskal, serta dukungan pembiayaan ketika negara menghadapi krisis. Sementara itu, strategi kemitraan World Bank untuk Indonesia periode 2026–2030 menekankan reformasi kelembagaan, mobilisasi investasi swasta, pembangunan infrastruktur, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi.⁴²

Bagi Solidaritas Perempuan, persoalan penting terletak pada bagaimana orientasi pertumbuhan ekonomi dan investasi diterjemahkan ke

⁴¹ International Monetary Fund. (n.d.). *IMF surveillance*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/about/factsheets/imf-surveillance>

⁴² World Bank. (n.d.). *Indonesia country partnership framework*. World Bank. <https://www.worldbank.org/ext/en/country/indonesia/cpf>

dalam praktik pembangunan di tingkat wilayah. Kasus *food estate* di Merauke, Papua Selatan, Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kalimantan tengah memperlihatkan hubungan antara pelaksanaan proyek strategis dan keterlibatan militer di sektor pembangunan strategis.⁴³ *Human Rights Watch* melaporkan kekhawatiran masyarakat mengenai kehilangan akses terhadap tanah adat, kerusakan hutan, serta kekerasan berlapis terhadap masyarakat yang menolak proyek. Temuan dan kesaksian tersebut perlu dibaca bersama tanggapan pemerintah dan diuji melalui mekanisme pemantauan independen. Kasus ini menjadi dasar untuk mengajukan pertanyaan tentang batas kewenangan militer dalam program sipil, transparansi pengambilan keputusan, dan jaminan bahwa kepentingan pembangunan tidak mengesampingkan hak masyarakat.

Keterhubungan tersebut penting dikaji karena kebijakan pembiayaan dan orientasi pembangunan dapat beririsan dengan keputusan pemerintah untuk melibatkan militer dalam pelaksanaan program sipil, pengelolaan wilayah, dan proyek strategis. Ketika pembangunan berorientasi pada investasi skala besar dan eksploitasi sumber daya alam, sementara konflik agraria ditangani melalui pendekatan militerisme, terdapat risiko bahwa kepentingan investasi lebih diutamakan daripada hak masyarakat atas tanah dan ruang hidup. Dalam situasi tersebut, pelibatan militer dapat memperkuat ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat, khususnya ketika pengawasan publik dan mekanisme pertanggungjawaban tidak memadai. Bagi perempuan akar rumput, kehilangan akses terhadap sumber daya, intimidasi, kriminalisasi, dan kerusakan lingkungan dapat memperbesar beban kerja perawatan serta mempersempit ruang perempuan untuk menentukan arah pembangunan komunitasnya. Di Indonesia,

⁴³ Pandiangan, R., A., Subekti, R. (n.d.). *Ketika Aktor Pertahanan Bergeser Menjadi Aktor Pembangunan: Apakah Ekspansi Peran TNI Melampaui Mandat Konstitusi?*. Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/ketika-aktor-pertahanan-bergeser-menjadi-aktor-pembangunan-apakah-ekspansi-peran-tni-melampaui-mandat-konstitusi/#:~:text=Pembentukan%20Batalyon%20Infanteri%20Teritorial%20Pembangunan%2C%20perluasan%20struktur%20Komando,menjadi%20wilayah%20institusi%20sipil%20%28Hidayat%20dan%20Radyawanto%2C%202025%29.>

meluasnya keterlibatan militer dalam ruang sipil dan pembangunan, termasuk dalam tata kelola sumber daya alam, wilayah agraria, dan proyek-proyek strategis. Situasi ini telah berdampak pada meluasnya ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat, sekaligus meningkatkan risiko intimidasi, kriminalisasi, serta kekerasan terhadap masyarakat khususnya perempuan dan subjek rentan yang mempertahankan tanah dan ruang hidupnya.

PRIVATISASI LAYANAN PUBLIK DAN MENINGKATNYA KERJA PERAWATAN PEREMPUAN

Krisis ekonomi Indonesia 1997–1998 memperlihatkan bagaimana reformasi struktural, perubahan subsidi, dan tekanan ekonomi memperburuk kehidupan masyarakat. Pada 1998, inflasi melonjak dan harga pangan meningkat, sementara IMF mendorong reformasi ekonomi dan World Bank menyetujui pinjaman Policy Reform Support Loan sebesar US\$1 miliar pada 2 Juli 1998.⁴⁴

Dalam lima tahun terakhir, orientasi pembangunan yang memperluas peran investasi swasta kembali terlihat melalui liberalisasi investasi pasca-UU Cipta Kerja, termasuk terbukanya sektor kesehatan bagi investasi swasta dan asing. World Bank juga mendukung reformasi kesehatan melalui pinjaman *Universal Health Coverage Development Policy Loan* sebesar US\$1 miliar pada 2023 dan pembiayaan penguatan sistem kesehatan. Pembiayaan ini tidak otomatis berarti privatisasi, tetapi perlu dikritisi ketika keterlibatan swasta dan orientasi efisiensi menggeser tanggung jawab negara dalam menjamin layanan yang universal, terjangkau, dan setara⁴⁵

⁴⁴ International Monetary Fund. (1998). *Indonesia: Memorandum of economic and financial policies*, April 10, 1998. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/external/np/loi/041098.htm>

⁴⁵ U.S. Department of State. (2024). *2024 investment climate statements: Indonesia*. US Department of State. <https://2021-2025.state.gov/reports/2024-investment-climate-statements/indonesia/>

Pengalaman privatisasi air Jakarta sejak 1997 menunjukkan risiko ketika pengelolaan kebutuhan dasar melibatkan operator swasta melalui konsesi jangka panjang. Ketika akses air bersih, kesehatan, dan layanan dasar tidak terjamin, perempuan harus mencari alternatif, menghemat pengeluaran, memenuhi kebutuhan pangan dan sanitasi, serta menambah kerja perawatan tanpa upah. Beban ini memperdalam feminisasi pemiskinan, terutama bagi perempuan akar rumput yang menghadapi keterbatasan pendapatan dan sumber daya. Dalam periode yang sama, rekomendasi IMF mengenai konsolidasi fiskal, reformasi subsidi energi, dan peralihan menuju pertumbuhan yang lebih dipimpin sektor swasta memperkuat kebutuhan untuk mengawasi dampak kebijakan terhadap belanja sosial. Jika penghematan anggaran atau komersialisasi layanan mengurangi akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, biaya yang semestinya ditanggung melalui layanan publik justru dialihkan kepada keluarga dan terutama kepada perempuan melalui peningkatan kerja perawatan tidak berbayar.⁴⁶

Kenaikan harga, hilangnya pekerjaan, penurunan pendapatan, dan tekanan terhadap layanan publik memperberat beban perempuan. Perempuan harus mengurangi kebutuhan pribadi, menjaga ketersediaan pangan, mencari tambahan penghasilan, menambah kerja perawatan, bahkan berutang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini memperlihatkan feminisasi pemiskinan. Ketika biaya krisis dialihkan ke rumah tangga dan ditanggung secara tidak proporsional oleh perempuan melalui ketimpangan akses terhadap sumber daya, pekerjaan layak, dan pengambilan keputusan ekonomi.

Beban kerja perawatan perempuan yang terus bertambah juga berkaitan dengan feminisasi migrasi. Ketika kebijakan ekonomi dan pembangunan menghilangkan sumber penghidupan masyarakat, sementara pekerjaan layak sulit diakses di daerah asal, perempuan semakin terdorong

⁴⁶ International Monetary Fund, Asia and Pacific Department. (2023). Indonesia: 2023 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Indonesia. *IMF Country Reports*, 2023(221). 104. <https://doi.org/10.5089/9798400244988.002.A001>

untuk melakukan migrasi untuk mendapatkan upah bagi keluarganya. Migrasi tersebut muncul bukan sebagai pilihan melainkan sebagai strategi bertahan hidup karena negara melegitimasi perampasan ruang hidup perempuan melalui berbagai kebijakan dan proyek pembangunan. Terbatasnya lapangan kerja, rendahnya upah, sempitnya akses pendidikan dan pelatihan, serta beban memenuhi kebutuhan keluarga mendorong perempuan mengambil pekerjaan di luar negeri dengan perlindungan yang tidak memadai.

Migrasi berwajah perempuan terlihat dari data global yang dirilis oleh International Labour Organization (ILO) pada 2022 bahwa setidaknya terdapat 167,7 juta pekerja migran yang tersebar di seluruh dunia di mana 64,9 juta atau sekitar 38,7% di antaranya adalah perempuan buruh migran. Dari angka tersebut, 81% dari seluruh perempuan buruh migran bekerja pada sektor domestik⁴⁷. Laporan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada 2024 menyatakan bahwa di tahun tersebut Indonesia telah menempatkan 297.434 buruh migran atau 0,11% dari tahun sebelumnya. Sebanyak 201.343 (67,69%) adalah perempuan yang terkonsentrasi pada sektor jasa yaitu: *housemaid*, *caregiver*, dan *domestic worker*. Namun, data yang disajikan oleh KP2MI tentunya tidak mencakup perempuan buruh migran yang diberangkatkan secara *unprosudural*. Padahal, penempatan perempuan buruh migran *unprosudural* angkanya jauh lebih tinggi dari pada yang tercatat oleh negara yang didominasi oleh perempuan bekerja pada sektor domestik⁴⁸.

Selain itu, perempuan yang dipaksa dan terpaksa untuk bermigrasi merupakan dampak dari budaya patriarki yang melekatkan perempuan terhadap kerja-kerja domestik dan memastikan terpenuhinya kebutuhan domestik keluarga dengan tetap menjalankan kerja-kerja perawatan dan

⁴⁷ International Labour Organization. (2024). *ILO global estimates on international migrant workers: International migrants in the labour force (4th ed.)*. International Labour Organization.
<https://doi.org/10.54394/ESKI5420>

⁴⁸ Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2025). *Data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia periode tahun 2024*. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
<https://kp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2024>

pengasuhan di tengah keterbatasan yang dimilikinya. Pekerjaan memasak, membersihkan rumah, merawat anak, mendampingi lansia, dan memenuhi kebutuhan anggota keluarga sejak lama dilekatkan pada perempuan serta dianggap sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan khusus. Anggapan ini membuat kerja perawatan kerap dibayar rendah, tidak diakui sebagai pekerjaan yang setara, dan luput dari perlindungan yang memadai. Ketika pekerjaan yang sama dilakukan di luar negeri, perempuan menghadapi risiko jam kerja panjang, upah tidak dibayar, penahanan dokumen, kekerasan, hingga perdagangan orang.

Data advokasi Solidaritas Perempuan tahun 2025 mencatat bahwa 80,5% kasus pelanggaran hak dialami oleh perempuan buruh migran yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Jam kerja panjang menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan, yaitu 14,10%. Sementara itu, kasus perdagangan orang dan penipuan masing-masing mencapai 12,82%, sedangkan kekerasan fisik, psikologis, dan seksual mencapai 11,11%.⁴⁹ Angka tersebut menggambarkan bagaimana perempuan buruh migran menghadapi eksploitasi dalam pekerjaan yang seharusnya menjadi sumber penghidupan bagi mereka dan keluarganya. Situasi ini semakin berat ketika perempuan diberangkatkan melalui jalur *unprosedural* tanpa jaminan keselamatan dan kepastian hukum. Dampaknya akan berlangsung panjang, mulai dari kehilangan penghasilan dan kesehatan, trauma psikologis, hingga kecacatan fisik dan kehilangan nyawa.

Namun, ketika pelanggaran tersebut terjadi, negara belum hadir dengan perlindungan yang menjamin hak perempuan buruh migran terpenuhi. Tingginya angka perempuan bermigrasi berkontribusi terhadap cadangan devisa yang signifikan bagi negara. Namun, kontribusi perempuan untuk negara ini tidak dijawab dengan perlindungan yang memadai. Penanganan kasus masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, tumpang tindih

⁴⁹ Amelia, Icut, A., Rina, Sani, F. F., Sari, N., Sofitasari., Tatubeket, F., Warlif, Y. (2026). *Nyala Harapan: Menolak Tunduk - 35 Tahun Berjuang Bersama Perempuan Akar Rumpuk (Catatan Tahunan [CATAHU] Solidaritas Perempuan 2025)*. Andriyeni (Ed.). Jakarta: Solidaritas Perempuan.

kewenangan, lemahnya koordinasi dengan negara penempatan, dan alasan ketiadaan bukti. Data advokasi Solidaritas Perempuan juga mencatat kasus yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun. Sebagian perempuan dan keluarganya harus menunggu tanpa kepastian mengenai penanganan kasus, pemulangan, maupun pemenuhan hak korban. Bahkan, perempuan yang menjadi korban perdagangan orang dan kekerasan masih menghadapi hambatan untuk memperoleh restitusi dan pemulihan. Negara seolah menyerahkan beban penyelesaian kepada perempuan, keluarga, atau pihak yang memberangkatkan, padahal kewajiban melindungi warga negara tetap melekat pada negara. Negara wajib memastikan setiap perempuan buruh migran memperoleh akses terhadap bantuan, keadilan, pemulangan yang aman, rehabilitasi, dan pemulihan hak.

Kegagalan negara dalam melindungi perempuan buruh migran ini berakar pada kebijakan yang terus membebankan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup kepada perempuan, sementara akses terhadap pekerjaan layak dan layanan publik masih terbatas. Oleh karena itu, privatisasi layanan publik, meningkatnya kerja perawatan, dan feminisasi migrasi saling berkaitan melalui kebijakan ekonomi yang membebankan biaya pemenuhan kebutuhan dasar kepada rumah tangga. Ketika layanan publik tidak menjangkau masyarakat secara layak, pekerjaan perawatan bertambah. Ketika sumber penghidupan menyempit, perempuan terdorong bermigrasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika perlindungan bagi perempuan buruh migran lemah dan kerja domestik terus diremehkan, perempuan kembali menanggung dampak dari ketimpangan tersebut melalui eksploitasi tenaga, kehilangan penghasilan, kekerasan, dan terputusnya akses terhadap hak-hak mereka.

GERAKAN FEMINIS PEREMPUAN AKAR RUMPUT MELAWAN KETIDAKADILAN UTANG



Di tengah kuatnya sistem patriarki dan neoliberalisme yang melanggengkan ketimpangan, perempuan dan kelompok yang mengalami penindasan memiliki peran penting dalam memperjuangkan tatanan ekonomi yang lebih adil. Ekonomi feminis menawarkan pendekatan yang menempatkan kerja reproduktif dan perawatan sebagai bagian penting dalam kebijakan serta pengambilan keputusan ekonomi. Pendekatan ini mendorong sistem ekonomi yang berlandaskan solidaritas, kerja sama, keberlanjutan, dan pembagian sumber daya secara lebih setara. Upaya tersebut juga menuntut analisis yang melampaui ketimpangan gender dengan memperhitungkan warisan kolonialisme dan berbagai bentuk penindasan yang saling berkaitan. Berangkat dari pandangan tersebut, Solidaritas Perempuan mengusung agenda gerakan feminis untuk memperjuangkan keadilan ekonomi berikut ini.⁵⁰

⁵⁰ Kurniawaty, A., Aziziah, S. P. N. (2023). *Gerakan Feminis dan Perjuangan Keadilan Ekonomi: Catatan Kritis Solidaritas Perempuan atas Sistem Ekonomi Politik Global*. Solidaritas Perempuan.

1. Demokratisasi dan Dekolonisasi Ekonomi

Pembuatan kebijakan ekonomi tidaklah netral gender, tetapi merupakan pilihan politik yang menentukan siapa yang memperoleh keuntungan dan siapa yang harus menanggung dampaknya. Selama ini, pengambilan keputusan ekonomi didominasi oleh kelompok elite yang membentuk sistem untuk melayani kepentingan mereka, sementara masyarakat yang terdampak memiliki ruang terbatas untuk menentukan arah kebijakan. Oleh karena itu, demokratisasi dan dekolonisasi pengambilan keputusan ekonomi menjadi langkah penting untuk membongkar dominasi tersebut, mengakhiri hak istimewa elite, serta melawan subordinasi negara-negara Selatan yang berakar pada sejarah kolonialisme. Proses ini harus diwujudkan melalui pengambilan keputusan yang partisipatif dan transparan di tingkat lokal maupun nasional, sekaligus mengakhiri intervensi IMF dan World Bank yang menggunakan pengaruh ekonomi untuk mengarahkan kebijakan demi kepentingan modal yang sering kali dengan mengorbankan hak dan kepentingan masyarakat.

2. Berfokus pada Tujuan Pembangunan Ekonomi untuk Memajukan Kesejahteraan Umum

Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia harus berpijak pada amanat UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dengan menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Angka pertumbuhan yang tinggi kehilangan maknanya ketika kekayaan terkonsentrasi pada segelintir kelompok, sementara perempuan dan masyarakat terus menanggung beban krisis, ketimpangan, serta kebijakan ekonomi yang mengutamakan kepentingan modal. Oleh karena itu, perspektif feminis mendorong perubahan arah kebijakan menuju distribusi sumber daya dan kekayaan yang lebih adil sehingga perempuan memiliki kesempatan serta kuasa yang setara untuk mengakses dan mengendalikan sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Agenda ini juga menuntut kritik terhadap kebijakan lembaga seperti IMF dan World Bank ketika dorongan pada pertumbuhan, disiplin fiskal, dan kepentingan investor justru mempersempit

ruang negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Pembangunan semestinya diukur dari sejauh mana masyarakat dapat hidup layak, memperoleh layanan publik, mengakses sumber penghidupan, dan ikut menentukan keputusan ekonomi yang memengaruhi kehidupan mereka.

3. Peran Negara dalam Memastikan Tujuan Ekonomi

Pencapaian kesejahteraan masyarakat tidak bisa bergantung pada mekanisme pasar bebas yang menempatkan keuntungan sebagai penggerak utama dan menyerahkan pemenuhan kebutuhan hidup pada kemampuan masing-masing orang untuk membayar. Negara harus mengambil peran aktif untuk mengendalikan ketimpangan, melindungi hak pekerja, menjaga kelestarian lingkungan, serta menggunakan kebijakan fiskal untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil dan membiayai layanan publik. Kebijakan ekonomi yang mengutamakan penghematan anggaran dan membatasi belanja publik akan memperdalam ketimpangan jika mengabaikan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Negara harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi berpihak pada kepentingan masyarakat, melindungi pekerja dan lingkungan, serta menyediakan layanan dasar yang layak agar tanggung jawab perawatan tidak terus dibebankan secara tidak adil kepada perempuan.

4. Pengakuan atas Peran Signifikan dan Sentral dari Ekonomi Reproduksi

Hal ini bagian dari pengakuan peran ekonomi reproduktif perempuan dalam mendukung ekonomi produktif dan meningkatkan kesejahteraan. Ekonomi feminis berarti kerja-kerja perawatan yang tidak dibayar dan pekerjaan rumah tangga diakui sepenuhnya dalam kebijakan dengan tanggung jawab untuk perawatan dibagi secara lebih setara tidak hanya antara perempuan dan laki-laki tapi juga antara keluarga dan masyarakat dengan penyediaan layanan publik yang dapat diakses secara umum dengan pendanaan yang layak.

SIKAP POLITIK FEMINIS SOLIDARITAS PEREMPUAN



Solidaritas Perempuan, memandang utang dan pembiayaan pembangunan oleh International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan lembaga keuangan internasional lainnya sebagai bagian dari tata kelola ekonomi global yang mempengaruhi kebijakan fiskal dan kebijakan pembangunan di Indonesia, penguasaan sumber daya alam dan feminisasi pemiskinan. Ketika pembayaran utang dan kebijakan fiskal mempersempit ruang fiskal serta mengurangi anggaran layanan publik dan perlindungan sosial, perempuan akar rumput menanggung beban berlapis melalui peningkatan kerja perawatan tidak dibayar, pemiskinan, hilangnya sumber penghidupan, kriminalisasi dan terbatasnya akses terhadap layanan dasar.

Dampak tersebut tidak dirasakan secara setara. Perempuan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan buruh migran dan subjek marginal lainnya menghadapi diskriminasi dan hambatan struktural yang saling berkelindan. Sementara itu, pembiayaan transisi energi dan iklim berbasis utang berisiko memperpanjang ketergantungan finansial, mendorong perampasan ruang hidup, memperdalam konflik agraria, dan mengalihkan

beban krisis ekologis kepada masyarakat yang paling terdampak khususnya perempuan akar rumput. SP menegaskan bahwa transisi energi yang adil tidak cukup dengan mengganti energi fosil menjadi energi terbarukan, tetapi harus mengubah relasi kuasa patriarkal dan model pembangunan ekstraktif. Pendanaan pembangunan dan iklim harus menjamin keadilan gender, keadilan agraria, kedaulatan pangan, keadilan ekologis, serta pengakuan atas hak dan kedaulatan perempuan akar rumput. Perempuan dan kelompok yang mengalami diskriminasi berlapis harus diakui sebagai pemegang hak dan pengambil keputusan, bukan sekadar penerima manfaat atau penanggung beban pembangunan.

Oleh karena itu, Solidaritas Perempuan menuntut utang dan pembiayaan pembangunan tidak boleh menjadi instrumen yang memperpanjang pemiskinan, perampasan ruang hidup, dan ketimpangan. Keadilan ekonomi tidak akan terwujud tanpa keadilan gender, keadilan agraria, keadilan ekologis, serta penghentian militerisasi yang mengancam kehidupan dan perjuangan perempuan akar rumput. Kami mendesak reformasi tata kelola IMF–World Bank, audit dan pembatalan utang tidak adil, penerapan keadilan fiskal feminis, serta realokasi anggaran untuk pemenuhan hak rakyat, perlindungan sosial, keadilan agraria, dan kedaulatan transisi energi yang berkeadilan gender dan berkelanjutan.

Setiap kebijakan dan proyek yang dibiayai melalui utang harus menjamin partisipasi bermakna perempuan, pengakuan dan perlindungan hak atas tanah serta sumber daya, keadilan ekologis, dan akuntabilitas atas dampaknya. Kami menolak pembangunan yang berorientasi pada akumulasi modal, ekstraktivisme, privatisasi, dan militerisasi yang mengorbankan kehidupan masyarakat.

1. Batalkan utang yang tidak adil, tidak sah, dan tidak berkelanjutan yang membebani rakyat, memperdalam ketimpangan, serta mengorbankan pemenuhan hak dan kelestarian lingkungan.

2. Hentikan kebijakan penghematan yang mengorbankan rakyat. Alihkan sumber daya publik dari pembayaran utang yang membebani masyarakat menuju layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pemenuhan hak perempuan, kedaulatan pangan, dan penguatan ekonomi dan inisiatif transisi energi berbasis komunitas lokal.
3. Pendanaan hibah, bukan pinjaman baru, untuk pendanaan iklim, khususnya adaptasi, pemulihan bencana, serta penanganan kerugian dan kerusakan (*loss and damage*), berdasarkan tanggung jawab historis negara-negara industri.
4. Hentikan pembiayaan energi fosil dan solusi iklim palsu. Desak Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional menghentikan pembiayaan batu bara, minyak, gas, serta proyek yang diklaim sebagai energi transisi tetapi memperpanjang ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dorong penghentian penggunaan energi fosil secara adil dan bertahap, dengan kendali komunitas atas kebijakan energi serta perlindungan bagi perempuan dan masyarakat yang terdampak.
5. Wajibkan audit utang dan pembiayaan secara independen, transparan, dan partisipatif dengan perspektif feminis interseksional untuk mengungkap aliran dana, penerima manfaat, serta dampak sosial, gender, dan ekologisnya.
6. Jamin partisipasi bermakna dan perlindungan kelompok terdampak, termasuk perempuan akar rumput, masyarakat adat, komunitas lokal, perempuan dengan disabilitas, dan perempuan pembela HAM. Hormati Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC), sediakan mekanisme pengaduan dan pemulihan yang efektif, serta hentikan pendekatan militeristik dalam penyelesaian konflik agraria.
7. Reformasi tata kelola keuangan global agar demokratis, adil, transparan, dan berkeadilan gender, dengan menempatkan

pemenuhan hak asasi manusia serta keadilan sosial dan ekologis di atas kepentingan investasi dan akumulasi modal.

8. Tingkatkan penerimaan negara dari sumber yang adil untuk membiayai layanan publik dan pemenuhan hak perempuan, bukan membebankan kebutuhan pembangunan kepada rakyat melalui utang dan pajak yang regresif.
9. Hentikan komersialisasi layanan publik dan kerja perawatan. Tolak privatisasi dan pengambilan keuntungan dari air, perumahan, transportasi, energi, kesehatan, pendidikan, serta pengelolaan sampah. Perkuat layanan publik yang dibiayai negara, penuhi kebutuhan tenaga kerja dan upah layak, serta distribusikan ulang kerja perawatan tidak berbayar yang selama ini dibebankan kepada perempuan.
10. Hentikan perampasan tanah, penggusuran, kriminalisasi, dan kerusakan ekosistem akibat pertambangan mineral kritis, proyek energi, serta pembangunan infrastruktur. Lindungi wilayah kelola rakyat dan masyarakat adat serta pastikan pemulihan dan pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan korporasi maupun lembaga pembiayaan.
11. Tolak penguasaan tanah oleh kepentingan investasi yang mendorong penggusuran serta administratif formal akses dan kontrol perempuan dan masyarakat terhadap sumber agraria
12. Hentikan dukungan pembiayaan terhadap industri dan proyek ekstraktif yang terkait dengan konflik, perampasan sumber daya, serta pelanggaran hak asasi manusia.
13. Alihkan anggaran militer yang tidak berorientasi pada perlindungan rakyat dan dukungan layanan publik, pemulihan ekologis, penguatan ekonomi komunitas, serta perlindungan perempuan dan anak yang mengalami eksploitasi, kekerasan, dan pemiskinan akibat konflik, bencana ekologi, maupun pertambangan.

Solidaritas Perempuan menyerukan penguatan gerakan dari komunitas akar rumput hingga tingkat nasional dan internasional untuk menuntut perubahan sistem ekonomi yang menempatkan kehidupan di atas utang, keuntungan korporasi, dan kepentingan geopolitik.



Batalan utang yang tidak adil! Hentikan pemiskinan perempuan atas nama pembayaran utang! Alihkan sumber daya publik untuk pemenuhan hak rakyat, keadilan gender, agraria, dan ekologis, bukan untuk mempertahankan ketergantungan utang dan pembangunan yang eksploitatif! Perubahan sistem harus berpihak pada keadilan gender, kedaulatan rakyat, dan keberlanjutan kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, Icut, A., Sani, F. F., Rina, Sari, N., Sofitasari., Tatubeket, F., Warlif, Y. (2026). *Nyala Harapan: Menolak Tunduk - 35 Tahun Berjuang Bersama Perempuan Akar Rumput (Catatan Tahunan [CATAHU] Solidaritas Perempuan 2025)*. Andriyeni (Ed.). Jakarta: Solidaritas Perempuan.

Bretton Woods Project. (2026). *The Bretton Woods twins: How do the World Bank and IMF work together?*. Bretton Woods Project. <https://www.brettonwoodsproject.org/2026/07/the-bretton-woods-twins-how-do-the-world-bank-and-imf-work-together/>

Firmansyah M., Jatmiko, B. P. (2025). *Kebijakan Mitigasi Iklim di Indonesia Dinilai Pinggirkan Peran Perempuan Akar Rumput*. Kompas. <https://lestari.kompas.com/read/2025/12/30/203841286/kebijakan-mitigasi-iklim-di-indonesia-dinilai-pinggirkan-peran-perempuan>

Green Climate Fund. (n.d.). *Mitigation*. Green Climate Fund. <https://www.greenclimate.fund/portfolio/areas-of-work/mitigation>

Green Climate Fund. (n.d.). *"The World's Climate Fund for Developing Countries"*. Green Climate Fund. <https://www.greenclimate.fund/about>

International Labour Organization. (2024). *ILO global estimates on international migrant workers: International migrants in the labour force (4th ed.)*. International Labour Organization. <https://doi.org/10.54394/ESKI5420>

International Monetary Fund. (2026). *Annual meetings 2026: Schedule*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/meetings/2026/annual/schedule?date=2026-10-12>

International Monetary Fund. (2023). *IMF executive board concludes 2023 Article IV consultation with Indonesia*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/news/articles/2023/06/22/pr23229-indonesia-imf-executive-board-concludes-2023-article-iv-consultation-with-indonesia>

International Monetary Fund. (n.d.). *IMF surveillance*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/about/factsheets/imf-surveillance>

International Monetary Fund, Asia and Pacific Department. (2023). *Indonesia: 2023 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Indonesia*. *IMF Country Reports*, 2023(221). 104. <https://doi.org/10.5089/9798400244988.002.A001>

International Monetary Fund. (1998). *Indonesia—Memorandum of economic and financial policies*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/external/np/loi/011598.htm>

International Monetary Fund. (1998). *Indonesia--Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/external/np/loi/041098.htm>

International Monetary Fund. (2026). *Thailand-2026*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/news/seminars/campaigns/2026/10/thailand-2026>

Jakarta Globe. (2020). *Indonesia Resigns From World Bank's Doing Business Report Amid Manipulation Probe*. Jakarta Globe. <https://jakartaglobe.id/business/indonesia-resigns-from-world-banks-doing-business-report-amidmanipulation-probe>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Buku II Nota keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/507d21b0-2abe-4d75-86aa-dc3efe505843>

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2025). *Data penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia periode tahun 2024*. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. <https://kp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2024>

Kurniawaty, A., Aziziah, S. P. N. (2023). *Gerakan Feminis dan Perjuangan Keadilan Ekonomi: Catatan Kritis Solidaritas Perempuan atas Sistem Ekonomi Politik Global*. Solidaritas Perempuan.

Liang, X., et al. (2025). *Trends in World Military Expenditure*. Stockholm International Peace Research Institute. <https://www.sipri.org/publications/2026/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2025>

Official Aksi for Justice. (2026). *The World Bank's Crimes Against the Indonesian People*. Instagram. https://www.instagram.com/p/DebMvghD5J1/?img_index=1&xtok=MTR4YmQxcGh1djBqbQ%3D%3D

Pandiang, R., A., Subekti, R. (n.d.). *Ketika Aktor Pertahanan Bergeser Menjadi Aktor Pembangunan: Apakah Ekspansi Peran TNI Melampaui*

Mandat Konstitusi?. Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/ketika-aktor-pertahanan-bergeser-menjadi-aktor-pembangunan-apakah-ekspansi-peran-tni-melampaui-mandat-konstitusi/#:~:text=Pembentukan%20Batalyon%20Infanteri%20Teritorial%20Pembangunan%2C%20perluasan%20struktur%20Komando,menjadi%20wilayah%20institusi%20sipil%20%28Hidayat%20dan%20Radyawanto%2C%202025%29.>

PLN. (n.d.). *Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification-2 (ISLE-2) Project*. PLN. <https://www.pln.co.id/hubungan-investor-id/lainnya-id/indonesia-sustainable-least-cost-electrification-2-isle-2-project-id>

Santoso, B., Irianto, D. H. (2026). UU Cipta Kerja Diuji di MK, Komnas Perempuan Minta Hakim Gunakan Analisis Hukum Feminis. Suara.com. <https://amp.suara.com/news/2026/10/12/133240/uu-cipta-kerja-diuji-di-mk-komnas-perempuan-minta-hakim-gunakan-analisis-hukum-feminis>

Saputra, E. Y. (2026). *Kerugian Konstitusional Perempuan Akibat PSN, Seperti Apa?*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/solidaritas-perempuan-undang-undang-cipta-kerja-2281862>

Tanjung, E. (2024). Mimpi Buruk Proyek Geothermal: Keteguhan Warga Poco Leok Jaga Tanah dan Adat. Liputan Khas Suara. https://liks.suara.com/read/2024/10/14/113007/mimpi-buruk-proyek-geothermal-keteguhan-warga-poco-leok-jaga-tanah-dan-adat#google_vignette

The Government Public Relation Department of Thailand. (2026). *“Green Meeting” initiative at the 2026 IMF-WBG Meetings in Bangkok*. The Government Public Relation Department of Thailand. <https://thailand.prd.go.th/en/content/category/detail/id/48/iid/549725>

United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. (n.d.). *Structural adjustment programmes*. <https://archive.unescwa.org/structural-adjustment-programmes>

U.S. Department of State. (2024). *2024 investment climate statements: Indonesia*. U.S. Department of State. <https://2021-2025.state.gov/reports/2024-investment-climate-statements/indonesia/>

World Bank Group. (n.d.). *Ambisi Iklim Indonesia Mendapatkan Dorongan Melalui Reformasi Administrasi Pertanahan dan Perencanaan Tata Ruang yang Didukung oleh Bank Dunia*. World Bank. <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2024/09/30/indonesia-s->

[climate-ambitions-gain-boost-through-world-bank-supported-land-administration-and-spatial-planning-reform](#)

World Bank Group. (2026). *Civil society policy forum: Annual meetings 2026*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/events/2026/10/13/civil-society-policy-forum-annual-meetings-2026>

World Bank. (2020). *Doing business 2020: Indonesia*. World Bank. <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf>

World Bank. (n.d.). *Indonesia country partnership framework*. World Bank. <https://www.worldbank.org/ext/en/country/indonesia/cpf>

World Bank. (2024). *Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification-2 (ISLE-2) Program-for-Results (PforR) (P501217): Environmental and Social Systems Assessment (ESSA) report*. World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099070224053020856/pdf/P501217-b0b3bea7-e048-4268-a754-ec763600f728.pdf>

World Bank. (2026). *Small AI, big jobs*. World Bank. <https://live.worldbank.org/en/event/2026/annual-meetings-small-ai-big-jobs>

World Bank. (2025). *World Bank approves investments to boost Indonesia's economic growth and access to clean energy*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/06/16/world-bank-approves-investments-to-boost-indonesia-s-economic-growth-and-access-to-clean-energy>

World Bank. (2020). *World Bank statement on omnibus law – job creation*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/statement/2020/10/16/world-bank-statement-on-omnibus-law-job-creation>

Wuran, E. (2026). *Solidaritas Perempuan Flobamoratas: Gugatan Warga Poco Leok terhadap Bupati Manggarai Ujian Komitmen Perlindungan Negara atas Perempuan Adat*. Floresa. <https://floreasa.co/reportase/mendalam/83681/2026/01/31/solidaritas-perempuan-flobamoratas-gugatan-warga-poco-leok-terhadap-bupati-manggarai-ujian-komitmen-perlindungan-negara-atas-perempuan-adat#:~:text=Floreasa.co%20E2%80%93Solidaritas%20Perempuan%20Flobamoratas%20%28SPF%29%20yang%20berbasis,komitmen%20negara%20melindungi%20perempuan%20adat%20dan%20ruang%20sipil.>



Komunitas Solidaritas Perempuan

SP Anging Mammiri (Sulawesi Selatan), SP Bungoeng Jeumpa (Acheh), SP Flobamoratas (Nusa Tenggara Timur), SP Kendari (Sulawesi Tenggara), SP Kinasih (Yogyakarta), SP Palembang (Sumatera Selatan), SP Palu (Sulawesi Tengah), SP Mataram (Nusa Tenggara Barat), SP Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), SP Sintuwu Raya Poso (Sulawesi Tengah), SP Sebay Lampung (Lampung), SP Mamut Menteng (Kalimantan Tengah)